

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan bilateral antara Bolivia dengan Chile mengalami dinamika yang cukup signifikan. Perang Pasifik 1879 – 1883 yang melibatkan Bolivia, Chile, dan Peru adalah penyebab utama buruknya hubungan diplomatik antara Bolivia dengan Chile, karena Bolivia terpaksa harus kehilangan seluruh wilayah pantainya sehingga menjadi sebuah negara yang *landlocked*. Perang Pasifik dimulai dari perebutan wilayah kaya mineral nitrat antara Chile dengan Bolivia, yaitu Gurun Atacama yang berada di bagian Barat Amerika Latin.¹

¹ Ben Armstrong, "A Landlocked Bolivia: Disputes between Bolivia, Peru, and Chile" *IPE (International Political Economy) Term Paper* (t.t) 1.
http://soundideas.pugetsound.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=writing_awards (diakses pada tanggal 15 Oktober 2014).

Gambar I.1 Peta Bolivia Sebelum Kehilangan Wilayah Pantainya



Sumber: Depsky, 2013

Perebutan wilayah di Gurun Atacama dimulai sejak tahun 1866 di mana Bolivia dan Chile menandatangani Traktat Perbatasan (Boundary Treaty) yang berisi mengenai pembagian Gurun Atacama menjadi dua wilayah dengan garis Lintang Selatan 24 derajat sebagai batas antarwilayah Bolivia dan Chile.² Pada tahun 1873, Bolivia dan Peru menandatangani Traktat Aliansi Tertutup (Secret Treaty of Alliance) yang isinya Bolivia dan Peru harus saling membantu jika salah satu dari keduanya mengalami konflik dengan negara lain. Pada tahun 1878, Bolivia menyita aset-aset Chile karena Chile tidak membayar pajak tambahan yang menyebabkan terjadinya konflik antara Bolivia dengan Chile. Sesuai dengan Traktat Aliansi Tertutup 1873, Peru ikut terlibat ke

² Armstrong, "Disputes between Bolivia, Peru, and Chile", 1.

dalam konflik antara Bolivia dengan Chile sehingga mengakibatkan terjadinya Perang Pasifik pada tahun 1879.³

Perang Pasifik berakhir pada tahun 1883 dan dimenangkan oleh Chile. Sebagai konsekuensi atas kemenangannya, Chile berhak untuk melakukan aneksasi terhadap sebagian wilayah milik Peru dan Bolivia. Melalui Traktat Ancón (Treaty of Ancón) 1883 yang ditandatangani oleh Chile dan Peru, Chile berhak atas Provinsi Arica, Tarapacá, dan Tacna milik Peru.⁴ Sedangkan melalui Pakta Perdamaian (The Truce Pact) 1884⁵ yang ditandatangani oleh Bolivia dan Chile, Chile berhak atas seluruh wilayah pantai milik Bolivia sehingga Bolivia menjadi sebuah negara yang *landlocked*. Walaupun begitu, Chile menyediakan kemudahan akses menuju Samudera Pasifik bagi Bolivia melalui jalan raya dan jalur rel kereta api serta meminjamkan dua pelabuhannya kepada Bolivia. Dua dekade kemudian Bolivia dan Chile menandatangani Traktat Perdamaian, Persahabatan, dan Perdagangan (Treaty of Peace, Friendship, and Trade) 1904⁶ yang berisi mengenai teknis penggunaan infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh Chile secara lebih detail sehingga menyempurnakan Pakta Perdamaian 1884.⁷

³ Daniel Arthur McCray, "Eternal Ramifications of the War of the Pacific" (tesis yang dipresentasikan pada Program Master of Arts, University of Florida, Mei, 2005), 3.

⁴ McCray, "Eternal Ramifications of the War of the Pacific".

⁵ Lebih lanjut lihat Lampiran I.

⁶ Lebih lanjut lihat Lampiran II.

⁷ Anonim, "Relations with Bolivia: New Difficulties" *Libertad Descarrollo* 8:1 (2011) 2. http://lyd.org/wp-content/themes/LYD/files_mf/pi1008.pdf (diakses pada tanggal 27 Maret 2015).

Gambar I.2 Peta Bolivia Setelah Kehilangan Wilayah Pantainya



Sumber: Jarroud, 2012.

Peta di atas merupakan gambaran geografis Bolivia kini di mana sebelumnya wilayah yang diarsir dengan warna merah merupakan wilayah Bolivia yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik, namun wilayah yang diarsir dengan warna merah tersebut menjadi milik Chile sejak terjadinya Perang Pasifik.

Bolivia yang sebelumnya terbiasa dengan kondisi geografisnya yang tidak *landlocked* mengalami berbagai hambatan karena harus beradaptasi dengan kondisi geografisnya yang baru. Untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang dialaminya, Bolivia kemudian meminta bantuan kepada Peru untuk memberikan kedaulatan terhadap wilayah perbatasan antara Peru dengan Chile yang berdekatan dengan

Samudera Pasifik kepada Bolivia sebagai akses menuju Samudera Pasifik, namun Peru menolak.⁸

Pada tahun 1975, Chile menawarkan pertukaran wilayah kepada Bolivia di mana Chile berkenan untuk memberikan sebagian wilayahnya di Arica Utara tetapi Bolivia harus memberikan sebagian wilayahnya yang sepadan kepada Chile sebagai gantinya. Penawaran ini menemui stagnansi karena tidak kunjung mendapat jawaban dari Bolivia. Peru kemudian mengusulkan untuk membagi kedaulatan di jalur akses menuju laut menjadi dua untuk Bolivia dan Chile, namun Chile menolak dengan alasan kedaulatan sebuah negara bersifat eksklusif.⁹ Karena serangkaian negosiasi ini menemui jalan buntu, akhirnya hubungan Bolivia dengan Chile semakin merenggang. Pada tahun 1978, hubungan diplomatik formal antara Bolivia dengan Chile terputus karena keduanya tidak ingin terlibat konflik.¹⁰

Selama hubungan diplomatik formal antara Bolivia dengan Chile terputus, intensitas sejumlah kerja sama bilateral antara Bolivia dengan Chile menjadi berkurang. Bahkan, baik Bolivia maupun Chile saling tidak menempatkan duta besarnya di masing-masing negara. Tidak hanya itu, namun juga terdapat sentimen anti-Chile di Bolivia yang cukup gencar di dalam ideologi politik Bolivia sehingga mampu mempengaruhi masyarakat Bolivia mulai dari kelas atas hingga bawah. Sentimen tersebut disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak

⁸ Anonim, "New Difficulties", 3.

⁹ Anonim, "New Difficulties", 3.

¹⁰ Eric D. Trismen, "Assessing the Potential for Interstate Conflict between Chile and Peru: A Political Economy Approach" (tesis yang dipresentasikan pada Program Master, Naval Postgraduate School Monterey California, Maret, 2009), 14.

bertanggung jawab yang hanya ingin meraup keuntungan politik tersendiri. Hal tersebut menyebabkan hubungan bilateral antara Bolivia dengan Chile semakin memburuk.¹¹

Di awal milenium kedua, hubungan bilateral antara Bolivia dengan Chile mulai melunak. Perlahan-lahan Bolivia dan Chile berkenan untuk melakukan negosiasi kembali terkait akses Bolivia menuju Samudera Pasifik. Bahkan pada tahun 2001, Presiden Bolivia pada saat itu, yaitu Jorge Quiroga berniat untuk membangun pipa gas melalui pelabuhan di Mejillones, Chile sebagai jalur terdekat menuju Samudera Pasifik untuk didistribusikan ke luar negeri. Presiden Quiroga bersama dengan Presiden Chile pada saat itu, yaitu Ricardo Lagos melakukan pembicaraan tertutup mengenai rencana pembangunan pipa gas tersebut untuk menghindari politisasi atas sentimen anti-Chile yang masih melekat di pola pikir masyarakat Bolivia. Sayangnya, tidak lama kemudian pembicaraan rahasia antara Presiden Quiroga dengan Presiden Lagos terbongkar di hadapan publik sehingga terjadi pertentangan dari masyarakat Bolivia. Akibat pertentangan tersebut tensi hubungan bilateral dengan Chile mulai meningkat karena otoritas Presiden Quiroga menjadi lemah.¹²

Pada tahun 2002, Gonzalo Sánchez de Lozada menggantikan posisi Presiden Quiroga sebagai Presiden Bolivia. Presiden de Lozada ingin memperbaiki hubungan bilateral antara Bolivia dengan Chile melalui

¹¹ Anonim, "New Difficulties", 4.

¹² Leslie Wehner, "From Rivalry to Mutual Trust: The Othering Process between Bolivia and Chile" *GIGA (German Institute of Global and Area Studies) Working Papers* 135 (2010) 14 – 15. http://www.giga-hamburg.de/en/system/files/publications/wp135_wehner.pdf (diakses pada tanggal 1 April 2015).

pendekatan ekonomi. Namun, karena situasi politik dan ekonomi di Bolivia yang kurang stabil, perbaikan hubungan bilateral antara Bolivia dengan Chile gagal. Presiden de Lozada kemudian turun dari jabatannya pada tahun 2003 dan digantikan oleh wakilnya, yaitu Carlos Mesa. Presiden Mesa merupakan sosok yang sangat tegas dalam menyikapi Chile. Pada masa pemerintahan Presiden Mesa, masalah kondisi geografis Bolivia yang *landlocked* diangkat ke beberapa institusi multilateral dan beberapa pemimpin dari negara lain sehingga mengundang simpati dari banyak pihak. Bahkan negara-negara di Amerika Latin yang lain turut membantu melakukan mediasi. Sedangkan Chile justru menghimbau Bolivia untuk tidak terjebak dalam kasus yang telah lampau, tetapi berfokus kepada masa depan, yaitu solusi dari pembangunan pipa gas.¹³

Pada tahun 2005, posisi Presiden Mesa digantikan dengan Eduardo Rodríguez. Pada masa kepemimpinan Presiden Rodríguez tidak terjadi perubahan yang terlalu signifikan karena hanya berlangsung selama setahun. Pada tahun 2006, hubungan bilateral antara Bolivia dengan Chile benar-benar menemui titik balik, terlebih pada saat Evo Morales yang diusung oleh Gerakan Sosialis Bolivia atau MAS Bolivia menggantikan posisi Presiden Rodríguez. Pada tahun yang sama, di Chile juga terjadi pergantian presiden, yaitu Michelle Bachelet yang diusung oleh Partai Sosialis Chile atau PS Chile. Peristiwa pergantian presiden yang terjadi secara bersamaan antara Bolivia dengan Chile

¹³ Wehner, "The Othering Process between Bolivia and Chile", 15 – 16.

dijadikan Presiden Morales sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri dengan Presiden Bachelet sehingga menyebabkan hubungan bilateral antara Bolivia dengan Chile semakin membaik hingga pada Bulan Maret 2006 diadakan pertemuan bilateral di Santiago, Chile untuk membahas Agenda 13 Poin (13 Points Agenda) yang rencananya diimplementasikan pada Bulan Juli 2006.¹⁴

Sesuai dengan namanya, Agenda 13 Poin 2006 berisikan 13 poin utama, yaitu (1) pembangunan kepercayaan *mutual*; (2) integrasi wilayah perbatasan; (3) bebas *transit*; (4) integrasi fisik; (5) komplementasi ekonomi; (6) tema maritim; (7) Silala dan sumber daya air; (8) instrumen untuk melawan kemiskinan; (9) keamanan dan perlindungan; (10) kerja sama untuk mengontrol perdagangan narkoba dan bahan-bahan kimia esensial dan prekursor; (11) pendidikan, sains, dan teknologi; (12) budaya; serta (13) isu-isu lain, seperti perjanjian yang memperbolehkan pasangan dari konsulat, staf administratif, dan staf teknis untuk melakukan pekerjaan yang dibayar; perjanjian mengenai isu keamanan sosial; dan kerja sama Chile untuk membantu pelaksanaan pemilu Bolivia di luar negeri.¹⁵ Agenda 13 Poin 2006 kemudian menandai rekonsiliasi hubungan bilateral antara Bolivia dengan Chile karena masyarakat Bolivia sudah tidak lagi menganggap Chile sebagai musuh yang harus dihindari dan dibenci sehingga perlahan-lahan sentimen anti-Chile mulai meredup.

¹⁴ Wehner, "The Othring Process between Bolivia and Chile", 17.

¹⁵ "Acta de ka XVII reunión del mecanismo de consultas políticas Chile-Bolivia", *Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile*, <http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20080716/pags/20080716180444.html> (diakses pada tanggal 20 Juni 2015). Lebih lanjut lihat Lampiran III.

I.2 Rumusan Masalah

Hilangnya wilayah pantai milik Bolivia yang dianeksasi oleh Chile sebagai konsekuensi dari Perang Pasifik sangat berdampak buruk bagi Bolivia sehingga menyebabkan terputusnya hubungan diplomatik formal antara Bolivia dengan Chile pada tahun 1978. Namun setelah beberapa dekade, tepatnya pada tahun 2001 hubungan bilateral antara Bolivia dengan Chile mulai membaik. Walaupun mengalami dinamika, membaiknya hubungan bilateral antara Bolivia dengan Chile mencapai puncaknya pada tahun 2006 dengan ditandai oleh terbentuknya Agenda 13 Poin yang disepakati oleh Bolivia dan Chile. Perubahan kebijakan luar negeri Bolivia terhadap hubungan bilateralnya dengan Chile mengantarkan peneliti untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

Mengapa kebijakan luar negeri Bolivia terhadap hubungan bilateralnya dengan Chile berubah – dari yang awalnya memburuk menjadi membaik – pada tahun 2001 – 2006?

I.3 Tujuan Penelitian

Dengan mendasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empirik dan menjelaskan argumentasi Bolivia dalam perubahan kebijakan luar negerinya terhadap Chile yang melakukan usaha perbaikan hubungan bilateral antara Bolivia dengan

Chile pada tahun 2001 – 2006 setelah hubungan diplomatik resmi keduanya terputus pada tahun 1978.

I.4 Manfaat Penelitian

Dengan mendasarkan pada konsiderasi aksiologis penelitian, maka penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu memberikan kontribusi perspektif Ilmu Hubungan Internasional sebagai kemasam dalam sebuah kasus internasional, memberi penjelasan kontemporer dinamika hubungan bilateral antara Bolivia dengan Chile, dan memperkaya penelitian kasuistik kontributif dalam Ilmu Hubungan Internasional di lingkungan lokal.

I.5 Tinjauan Pustaka

Peneliti melakukan *initial research* untuk mengetahui apakah sebelumnya terdapat peneliti lain yang telah menuliskan karya ilmiah yang sama dengan yang peneliti teliti, yaitu mengenai perubahan kebijakan luar negeri Bolivia terhadap hubungan bilateralnya dengan Chile pada tahun 2001 – 2006.

Ronald Stuart Kain dalam artikelnya yang berjudul “Bolivia’s Claustrophobia” menulis tentang kekhasan geografis Bolivia yang *landlocked* dan diapit oleh negara-negara dengan *power* yang cukup besar di Amerika Latin:

“Bolivia’s position in the South America is unique. Geographically, she is almost in the center of the continent.

Politically, she occupies a strategic situation as the only country bordering on all four of the so-called “ABCP Powers” – Argentina, Brazil, Chile, and Peru. These larger nations are therefore vitally interested in Bolivia’s political activities and in her economic development. But unfortunately for Bolivia – and for the peace of South America – she is a landlocked country under a constant fear of economic strangulation by her more powerful neighbors.”¹⁶

Kain menjelaskan bahwa Bolivia mengalami ketakutan tersendiri karena diapit oleh negara-negara yang memiliki *power* yang lebih besar daripada dirinya sedangkan kondisi geografisnya kurang memiliki daya saing karena *landlocked*. Padahal, negara-negara tetangga Bolivia memiliki ketertarikan tersendiri terhadap Bolivia pada aspek politik dan ekonomi.

Selanjutnya, Michael L. Faye, John W. McArthur, Jeffrey D. Sachs, dan Thomas Snow dalam artikel mereka yang berjudul “The Challenges Facing Landlocked Developing Countries” menuliskan bahwa kondisi geografis yang *landlocked* menjadi momok tersendiri bagi sebuah negara:

“Landlocked countries not only face the challenge of distance, but also the challenges that result from a dependence on passage through a sovereign transit country, one through which trade from a landlocked country must pass in order to access international shipping markets. While rivers were a more common form of trade transit in Smith’s time, the principle of dependence on neighbours applies equally to the more modern transport modes of roads and railways. Such dependence can take several forms, many of which are less deliberate than the power politics suggested Smith.”¹⁷

¹⁶ Ronald Stuart Kain, “Bolivia’s Claustrophobia” *Foreign Affairs* 16:4 (1938) 704.

¹⁷ Michael L. Faye, John W. McArthur, Jeffrey D. Sachs, dan Thomas Snow, “The Challenges Facing Landlocked Developing Countries” *Journal of Human Development* 5:1 (2004) 32.
<http://www.unmillenniumproject.org/documents/JHD051P003TP.pdf> (diakses pada tanggal 13 Juni 2015).

Faye, McArthur, Sachs, dan Snow menjelaskan bahwa menjadi sebuah negara yang *landlocked* tidak hanya memberatkan dari segi jarak tempuh menuju wilayah perairan yang cukup jauh, namun juga ketergantungan negara *landlocked* kepada negara-negara tetangganya karena harus melakukan *transit* untuk melakukan aktivitas perdagangan internasional.

Sedangkan Matthias Mäckelmann dan Michael Lingenthal dalam artikel mereka yang berjudul “Peru and Chile: Does the Road to Good Neighbourly Relations Lead Via the Hague?” menuliskan tentang hubungan bilateral antara Bolivia dengan Chile yang kurang harmonis:

“The relationship between Bolivia and Chile is similar. Bolivian governments are still bemoaning the loss of the sea as the cause of political, economic and social problems for the Bolivian people in spite of Chile having granted Bolivia free access to its ports after the end of the War of the Pacific in a treaty signed in 1904. This and other proposals voiced more recently, such as that for a tunnel to link Bolivia with the coast across Chilean sovereign territory, are viewed by Bolivia more as insults than as solutions because it maintains its demand for a sovereign access route to the Pacific and does not wish to have to rely on “Chile’s grace” to reach the coast. The above-mentioned treaty is still in force. Diplomatic relations between these two countries are still suffering from their joint past. Even today, the two countries only maintain a consulate in the respective other country rather than an embassy. Bolivia is currently refusing to sell the very important natural gas to Chile as long as Chile is not prepared to discuss a new border demarcation that would allow Bolivia to regain its own coastline.”¹⁸

Mäckelmann dan Lingenthal menjelaskan bahwa hubungan bilateral antara Bolivia dengan Chile kurang harmonis sejak Perang

¹⁸ Matthias Mäckelmann dan Michael Lingenthal, “Peru and Chile: Does the Road to Good Neighbourly Relations Lead Via the Hague?” *KAS (Konrad Adenauer Stiftung) International Reports* 3 (2012) 43. http://www.kas.de/wf/doc/kas_30495-544-2-30.pdf?130828111528 (diakses pada tanggal 14 Juni 2015).

Pasifik karena Bolivia menjadi sebuah negara yang *landlocked*. Bolivia kemudian terus-menerus menuntut Chile untuk mempertanggungjawabkan kecacatan kondisi geografis Bolivia yang diakibatkan oleh Chile. Bahkan Bolivia enggan menjual gas alamnya kepada Chile jika Chile tidak segera menyelesaikan masalah *landlocked* yang dialami oleh Bolivia.

Pernyataan Mäckelmann dan Lingenthal tersebut kemudian diperkuat dengan penjelasan Pat Paterson dan Rory Flynn dalam artikelnya yang berjudul “Border Disputes in Latin America” yang menjelaskan bahwa hubungan bilateral antara Bolivia dengan Chile memiliki tensi yang cukup tinggi:

“Bolivia’s landlocked status has frequently created groundswells of national irredentism. In 1978, it resulted in a break in diplomatic relations with Chile. Popular sentiment rose on the 100-year anniversary of 1904 treaty, and the issue has been the lightning rod for the President Evo Morales, elected in 2006. In October 2012, Morales raised tension between the two nations when he called Chile a threat to Bolivia. Relations further deteriorated later that month when Santiago, Chile, mayoral candidate Waldo Mora stated, “The only reason Bolivia wants a sovereign outlet to the sea is to ship drugs.” The remark was widely excoriated by the Bolivian press. Morales subsequently refused Chile’s offer for bilateral negotiations stating such talks would be a “waste of time.” In April 2013, Morales filed a suit at the International Court of Justice to reclaim access to the Pacific Ocean.”¹⁹

Paterson dan Flynn menjelaskan bahwa hubungan bilateral antara Bolivia dengan Chile semakin memburuk dari waktu ke waktu. Bahkan pada Bulan Oktober 2012, Presiden Morales menyatakan bahwa Chile

¹⁹ Pat Paterson dan Rory Flynn, “Border Disputes in Latin America” *Regional Insights* 2 (2013) 5. <http://chds.dodlive.mil/files/2013/12/pub-RI-paterson.pdf> (diakses pada tanggal 14 Juni 2015).

adalah ancaman bagi Bolivia. Bahkan, Calon Walikota Santiago pada saat itu, yaitu Waldo Mora menyampaikan kalimat yang menyinggung perasaan Presiden Morales – bahwa Bolivia ingin mendapatkan akses menuju Samudera Pasifik yang berdaulat karena ingin menjual narkoba – sehingga menyebabkan Bolivia terpaksa harus melakukan penuntutan ke Mahkamah Pengadilan Internasional atau ICJ.

Cristieli Carvalho dos Santos dan Inaê Oliveira dalam artikel mereka yang berjudul “Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile)” menuliskan lebih detail mengenai penuntutan Presiden Morales ke ICJ tersebut:

“In the 19th century, Bolivia and Chile got involved in a war known as War of the Pacific. The war’s outcome was the Chilean annexation of a valuable disputed territory on Pacific coast which former belonged to Bolivia’s coastline. As a result of such territorial loss, Bolivia became a landlocked nation. However, Bolivia has never accepted its landlocked nation’s condition and has persistently try to enter into direct negotiations with Chile in order to recover sovereignty over its lost coastline. Despite statements of high Chilean officials declaring willing to dialogue, direct negotiations proved to be unfruitful. In the face of such circumstances, Bolivia presented a claim against Chile to the International Court of Justice in April 2013. In its application, Bolivia requests the ICJ to adjudge and declare (a) that Chile has the obligation to negotiate with Bolivia in order to reach an agreement granting Bolivia a fully sovereign access to the Pacific Ocean; (b) that Chile has violated this obligation and (c) that Chile must perform the obligation in good faith, promptly, formally, effectively and within a reasonable time. In this sense, the ICJ judges must decide if Chile is bound by international law to enter into negotiations regarding Bolivia’s fully sovereign access to the Pacific Ocean and, if so, whether it has failed to fulfill such obligation.”²⁰

²⁰ Cristieli Carvalho dos Santos dan Inaê Oliveira, “Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile)” *UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) Model United Nations 2* (2014) 213. <http://www.ufrgs.br/ufrgsmun/2014/files/ICJ2.pdf> (diakses pada tanggal 14 Juni 2015).

Dos Santos dan Oliveira menjelaskan bahwa Bolivia yang tidak puas dengan kondisi geografisnya yang *landlocked* akibat Perang Pasifik dengan Chile menyebabkan Bolivia melakukan penuntutan ke ICJ pada Bulan April 2013. Penuntutan tersebut secara garis besar berisi permohonan Bolivia kepada Chile untuk segera melakukan negosiasi dengan Bolivia untuk memberikan Bolivia akses menuju Samudera Pasifik yang berdaulat.

Dari lima artikel yang telah peneliti telaah, mayoritas hanya membicarakan masalah geografis Bolivia yang *landlocked*, kerugian menjadi negara *landlocked*, hubungan bilateral antara Bolivia dengan Chile, dan penuntutan Bolivia ke ICJ. Terdapat ruang kosong di antara peristiwa setelah Perang Pasifik pada tahun 1883 hingga pemutusan hubungan diplomatik pada tahun 1978 hingga penuntutan ke ICJ pada tahun 2013 yang luput dari penelitian para peneliti sebelumnya. Padahal, setelah peneliti teliti lebih lanjut di antara tahun 1978 – 2013 sempat terjadi proses rekonsiliasi antara Bolivia dengan Chile yang terjadi pada tahun 2001 – 2006. Oleh karena masih belum ada yang meneliti mengenai proses rekonsiliasi antara Bolivia dengan Chile, peneliti mengambil topik perubahan kebijakan luar negeri Bolivia yang sebelumnya bersifat *hostile* menjadi lebih bersahabat dengan Chile pada tahun 2001 – 2006.

I.6 Kerangka Pemikiran

Terdapat kemungkinan bahwa hubungan bilateral antara Bolivia dengan Chile yang awalnya buruk akibat Perang Pasifik menjadi membaik pada tahun 2001 – 2006 dikarenakan oleh ideologi politik Presiden Morales dan Presiden Bachelet yang sama, yaitu sosialis. Argumen ini diperjelas oleh bukti di mana presiden sebelum dan sesudah Presiden Morales dan Presiden Bachelet tidak dapat menjalin hubungan baik yang stabil antara satu sama lain.²¹ Nyatanya, hubungan antara kesamaan ideologi politik antarpemimpin negara dengan aktivitas hubungan internasional dapat dijelaskan melalui *review* Mark L. Haas terhadap dua buku karyanya. Haas percaya bahwa ideologi politik merupakan preferensi seorang pemimpin negara untuk menata dunia perpolitikan. Ideologi politik, menurut Haas adalah prinsip dan tujuan politik yang spesifik dan terkadang bersifat istimewa yang dinilai sangat tinggi oleh seorang pemimpin negara sehingga menjadi alat untuk mengesahkan kekuasaannya. Ideologi politik seorang pemimpin negara tidak hanya berguna bagi politik domestik sebuah negara, namun juga berguna bagi hubungan internasional negara tersebut. Ideologi politik mampu membentuk persepsi ancaman dari seorang pemimpin negara dan akibat kebijakan luar negeri dengan dua cara, yaitu (1) ideologi politik dapat membantu pemimpin negara untuk menilai maksud dan

²¹ Presiden Mesa (Presiden Bolivia sebelum Presiden Morales) tidak dapat menjalin hubungan bilateral yang baik dengan Presiden Lagos (Presiden Chile sebelum Presiden Bachelet) karena ketidaksamaan ideologi politik antara Presiden Mesa yang konservatif dan Presiden Lagos yang sosialis. Sebastian Piñera (Presiden Chile setelah Bachelet) tidak dapat mempertahankan hubungan bilateral baik yang telah dibentuk oleh Presiden Morales dan Mantan Presiden Bachelet karena ketidaksamaan ideologi politik antara Presiden Piñera yang konservatif dan Presiden Morales yang sosialis. Lihat Wehner, "The Othering Process between Bolivia and Chile", 8.

tujuan dari pemimpin negara lain. Semakin besar perbedaan ideologi politik antarpemimpin negara, maka semakin besar pula prasangka buruk antara satu sama lain dan (2) ideologi politik dapat membantu pemimpin negara untuk menilai ancaman yang terjadi di negaranya dengan cara menjaga rezimnya agar tidak turun ke ideologi politik yang lain sehingga ideologi politik yang dipercayainya mampu dijadikan alat untuk mempertahankan negara.²²

Walaupun begitu, para pemimpin negara dengan ideologi politik yang berbeda tidak selalu saling bermusuhan, pun juga para pemimpin negara dengan ideologi politik yang sama tidak selalu saling berdamai. Hubungan bilateral antara Uruguay dengan Argentina misalnya. Baik Presiden Uruguay pada tahun 2010, yaitu José Mujica dan Presiden Argentina pada tahun 2010, yaitu Cristina Fernández de Kirchner memiliki ideologi politik yang sama – ideologi politik sayap kiri atau *left-wing* – namun hubungan bilateral antara keduanya justru kurang harmonis.²³ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kesamaan ideologi politik antarpemimpin tidak menjamin keharmonisan hubungan antarnegara, sehingga diperhitungkan adanya faktor-faktor pendukung lain yang dapat menjelaskan determinan keharmonisan hubungan

²² Mark L. Haas, "Ideologies and International Relations", review dari *The Ideological Origins of Great Power Politics, 1789-1989*, oleh Mark L. Haas dan *The Clash of Ideologies: Middle Eastern Politics and American Security*, oleh Mark L. Haas, *The Montreal Review* (Maret, 2012): 1.

²³ Hubungan bilateral yang buruk antara Uruguay dengan Argentina disebabkan oleh sengketa pabrik bubur kertas yang diperebutkan oleh keduanya. Serangkaian usaha mediasi gagal dilakukan, bahkan ideologi politik yang sama antara Presiden Mujica dengan Presiden de Kirchner pun tidak mampu mendamaikan Uruguay dan Argentina. Lihat Jo March, "Uruguay's Foreign Minister: Relationship with Argentina Has Gone to Hell", *The Bubble*, Januari 27, 2014, <http://www.bubblear.com/uruguays-foreign-minister-relationship-with-argentina-has-gone-to-hell/> (diakses pada tanggal 7 Mei 2015).

antarnegara selain kesamaan ideologi politik. Sama halnya dengan kasus yang dialami Bolivia dan Chile, hubungan bilateral keduanya yang membaik di bawah kepemimpinan Presiden Morales dan Presiden Bachelet yang berideologi politik sama dapat menjadi salah satu faktor, namun bukan yang utama karena secara teoritik faktor ideologi politik saja tidak cukup untuk membuktikannya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori-teori pendukung lain untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang mendasari perubahan kebijakan luar negeri Bolivia yang sebelumnya bersifat *hostile* terhadap Chile, namun kemudian berubah menjadi lebih bersahabat dengan Chile pada tahun 2001 – 2006.

Peter A. Toma dan Robert F. Gorman dalam bukunya yang berjudul “International Relations: Understanding Global Issues” menuliskan setidaknya terdapat tiga determinan yang mampu mempengaruhi perilaku pembuatan kebijakan luar negeri, yaitu faktor sistemik yang berada di luar negara, faktor atribut nasional yang berada di dalam negara, dan faktor *idiosyncratic* yang berasal dari pribadi seorang pembuat kebijakan.²⁴ Dalam kasus yang dialami oleh Bolivia dan Chile, peneliti hanya menggunakan satu determinan yang ditawarkan oleh Toma dan Gorman, yaitu faktor atribut nasional. Peneliti tidak menggunakan faktor sistemik karena dalam kasus ini tidak terdapat aktor lain yang mengintervensi dinamika hubungan bilateral antara Bolivia dengan Chile dan *idiosyncratic* karena sifatnya terlalu

²⁴ Peter A. Toma dan Robert F. Gorman, *International Relations: Understanding Global Issues* (Kentucky: Brooks/Cole Pub. Co., 1991), 121 – 130.

subyektif – hanya melihat dari sisi pembuat kebijakan saja – sehingga kurang relevan dalam kasus yang sedang diteliti oleh peneliti.

I.6.1 Faktor atribut nasional sebagai salah satu determinan perilaku pembuatan kebijakan oleh Toma dan Gorman.

Faktor atribut nasional menurut Toma dan Gorman adalah faktor-faktor yang berada di dalam negara yang dapat menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan luar negeri, seperti geografi, ekonomi dan demografis. Dari segi geografi, yang mampu mempengaruhi adalah lokasi, ukuran, dan jenis. Geografi sebuah negara mampu mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri karena menentukan derajat ketergantungan sebuah negara dengan negara lain, misalnya negara yang *landlocked* akan lebih sering bergantung dengan negara lain daripada negara yang tidak *landlocked*. Dari segi ekonomi, yang mampu mempengaruhi adalah ukuran (berdasarkan PNB atau GNP, jenis (negara kaya atau berkembang), dan model (kapitalis, sosialis, atau komunis)). Perekonomian di suatu negara mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri karena merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh sebuah negara untuk bertahan hidup. Dari segi demografis, yang dapat mempengaruhi adalah ukuran, motivasi, kemampuan, tingkat pendidikan, dan homogenitas dari populasi negara. Masyarakat di suatu negara mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri karena masyarakat memiliki *power* yang cukup besar, terlebih di negara yang demokratis.²⁵

²⁵ Toma dan Gorman, *Understanding Global Issues*, 124 – 128.

Sebagai kaitan dengan determinan perilaku pembuatan kebijakan oleh Toma dan Gorman, peneliti menambahkan teori-teori pendukung lain untuk membantu memahami kasus perubahan kebijakan luar negeri Bolivia terhadap hubungan bilateralnya dengan Chile pada tahun 2001 – 2006, yaitu teori neoklasik dan konsep identitas nasional atau *national identity* berkaitan dengan geopolitik.

I.6.2 Teori neoklasik.

Kondisi geografis sebuah negara sangat erat hubungannya dengan kondisi perekonomian negara tersebut, misalnya negara dengan kondisi geografis yang *landlocked* cenderung mengalami sejumlah hambatan perekonomian. Hal tersebut dikarenakan oleh perdagangan internasional tidak dapat berjalan dengan maksimal. Saat barang dagangan didistribusikan ke negara lain, barang tersebut harus melewati beberapa negara menuju ke pelabuhan. Semakin banyak negara yang dilewati, maka biaya yang dikeluarkan semakin banyak pula, mulai dari biaya pengangkutan dan penurunan barang jika moda transportasi yang digunakan bermacam-macam hingga biaya penyimpanan barang. Bagi negara *landlocked*, aktivitas perdagangan internasional tidak membawa keuntungan yang sangat besar karena direduksi oleh biaya-biaya tersebut. Apalagi, total dari aktivitas ekspor dan impor lazimnya berdampak kepada PDB atau GDP. Oleh karena itu, negara *landlocked* cenderung mengalami kemunduran dari segi ekonomi.²⁶

²⁶ Landis MacKellar, Andreas Wörgöter, dan Julia Wörz, "Economic Development Problems of Landlocked Countries" *Reihe Transformationsökonomie* 14 (2000) 2. <https://www.ihs.ac.at/publications/tec/te-14.pdf> (diakses pada tanggal 8 April 2015).

Kesulitan yang dialami oleh negara *landlocked* kemudian dimanfaatkan oleh negara tetangganya dengan membantu proses distribusi barang dagangan ke pelabuhan namun dikenai biaya tambahan sebagai pajak. Memang dengan dibantu negara tetangganya, negara *landlocked* tidak kesulitan untuk mendistribusikan barang dagangannya sendiri, namun biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit. Kondisi seperti ini dapat mempengaruhi hubungan politis antara negara *landlocked* dengan negara tetangganya. Negara *landlocked* kemudian memiliki kecenderungan untuk menjadi dependen kepada negara-negara tetangganya karena mengandalkan aktivitas perdagangan internasionalnya kepada negara-negara tetangganya.²⁷

Dalam teori neoklasik, berdasarkan persaingan sempurna dan skala hasil konstan, keuntungan perdagangan internasional yang dialami negara *landlocked* adalah statis. Walaupun teori neoklasik menunjukkan penyebab negara *landlocked* tidak dapat berkembang, teori tersebut menawarkan solusi yang dapat digunakan agar negara *landlocked* dapat lebih berkembang dalam jangka panjang,²⁸ contohnya adalah Swiss yang walaupun merupakan negara *landlocked* tetap dapat berkembang.²⁹ Walaupun ada kemungkinan bahwa negara *landlocked* dapat

²⁷ MacKellar, Wörgöter, dan Wörz, "Economic Development Problems of Landlocked Countries", 3.

²⁸ MacKellar, Wörgöter, dan Wörz, "Economic Development Problems of Landlocked Countries", 3.

²⁹ Swiss dapat berkembang dengan baik karena didukung oleh infrastruktur negara-negara tetangganya untuk membantunya mengakses wilayah perairan, yaitu Jerman dan Italia yang sangat memadai. Terlebih lagi, baik Jerman maupun Italia sangat membutuhkan komoditas Swiss sehingga kerja sama yang terjalin antara Swiss dengan Jerman dan Italia sangat baik. Lihat Paul Collier, *The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It* (New York: Oxford University Press, 2007), 55.

berkembang – seperti Swiss – tetap saja perkembangannya tidak secepat negara yang tidak *landlocked*.³⁰

I.6.3 Konsep identitas nasional berkaitan dengan geopolitik.

Identitas nasional adalah hasil dari konstruksi sebuah negara atau *state* yang berguna untuk menunjukkan bahwa seseorang merupakan salah satu bagian dari negara tersebut. Misalnya seseorang yang telah lama tinggal di Perancis maka orang tersebut adalah seorang warga negara Perancis.³¹ Oleh karena itu, identitas nasional erat kaitannya dengan geografi karena identitas nasional didasarkan oleh keberadaan individu di suatu tempat tertentu. Identitas nasional tidak hanya berhenti pada tingkat negara-bangsa atau *nation state* saja, namun bisa juga dioperasikan pada tingkatan-tingkatan geografis lain dari mulai subnasional, *pan-regional*, hingga global.³²

Sejak abad ke-17, wilayah yurisdiksi eksklusif sebuah negara sangat penting karena di dalamnya terdapat interaksi politik yang dilakukan oleh pemerintah nasional melalui diplomasi dan hukum internasional. Semakin tinggi intensitas negara dalam melakukan interaksi politik maka identitas nasional juga semakin terbentuk. Klaus Dodds mencontohkan Amerika Latin sebagai implementasi dari identitas nasional berkaitan dengan geopolitik karena hubungan wilayah antarnegara merupakan sebuah isu yang cukup sensitif mengingat

³⁰ MacKellar, Wörgöter, dan Wörz, "Economic Development Problems of Landlocked Countries", 3.

³¹ Frank Bechhofer dan David McCrone, *National Identity, Nationalism, and Constitutional Change* (London: Palgrave Macmillan, 2009) 4.

³² Klaus Dodds, *Geopolitics: A Very Short Introduction* (New York: Oxford University Press, 2007), 87 – 88.

masyarakat Amerika Latin sangat menjunjung tinggi identitas nasionalnya sehingga apa yang mereka punyai adalah sesuatu yang harus dijaga dan diperjuangkan.³³

I.7 Hipotesis

Berangkat dari kerangka pemikiran di atas, dapat ditarik hipotesis bahwa Bolivia mengubah kebijakan luar negerinya yang semula memutuskan hubungan diplomatik formal menjadi memperbaiki kembali hubungan bilateralnya dengan Chile bukan semata-mata karena kesamaan ideologi politik antara Presiden Morales dengan Presiden Bachelet yang sosialis, namun karena didasari oleh kepentingan Bolivia untuk mencari solusi atas kondisinya yang *landlocked* karena dengan menjadi negara *landlocked*, Bolivia mengalami kerugian tersendiri, yaitu menghambat aktivitas perdagangan internasionalnya dan mencederai identitas nasionalnya.

I.8 Metodologi Penelitian

I.8.1 Definisi konseptual dan operasional.

I.8.1.1 Hubungan diplomatik.

Hubungan diplomatik menurut Michael L. Leiby dan Christopher K. Butler adalah sebuah alat bagi sebuah negara untuk mengkomunikasikan ketidaksetujuan atau kesetujuannya terhadap kebijakan atau urusan negara lain. Hubungan diplomatik juga dapat

³³ Dodds, *Geopolitics: A Very Short Introduction*, 86 – 87.

digunakan untuk mengancam, menghargai, atau pemberian sanksi. Oleh karena gunanya sangat penting, maka sebuah negara perlu menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain untuk saling bekerja sama atau untuk sekadar berkomunikasi. Syarat utama terbentuknya hubungan diplomatik adalah terdapat penempatan duta besar beserta diplomat-diplomatnya dalam sebuah kantor kedutaan besar atau kantor konsulat jenderal di negara lain.³⁴

Lebih jauh Brian Pollins menyatakan bahwa terdapat hubungan antara hubungan diplomatik dengan ekonomi di mana semakin kuat hubungan persahabatan antarnegara, maka semakin kuat pula hubungan perekonomian antara keduanya. Sebaliknya pula, jika semakin lemah hubungan persahabatan antarnegara, maka semakin lemah pula hubungan perekonomian antara keduanya.³⁵

Selain itu, hubungan diplomatik juga ditandai dengan adanya hubungan antarpemerintah dari kedua negara atau *government to government diplomacy*. Hubungan antarpemerintah tersebut merupakan hubungan yang berlangsung secara formal dengan melalui cara-cara tradisional untuk saling melakukan komunikasi, contohnya melalui dokumen tertulis, pertemuan, *summit*, kunjungan diplomatik, dan lain-lain yang dilakukan oleh duta besar atau diplomat, presiden, menteri luar

³⁴ Michael L. Leiby dan Christopher K. Butler, "The Determinants of Diplomatic Dyads" *Annual Meeting of the Peace Science Society* (2005) 3. <http://www.unm.edu/~ckbutler/workingpapers/DiplomaticDyads.pdf> (diakses pada tanggal 14 Juni 2015).

³⁵ Brian Pollins, 1989 dalam Michael L. Leiby dan Christopher K. Butler, "The Determinants of Diplomatic Dyads" *Annual Meeting of the Peace Science Society* (2005) 9. <http://www.unm.edu/~ckbutler/workingpapers/DiplomaticDyads.pdf> (diakses pada tanggal 14 Juni 2015).

negeri, dan pejabat-pejabat lain yang berkaitan dengan urusan luar negeri.³⁶

Sehingga membaik atau memburuknya suatu hubungan diplomatik dapat dilihat dari adanya kantor kedutaan besar atau kantor konsulat jenderal beserta penempatan duta besar atau diplomat dari negara lain di sebuah negara, hubungan perekonomian yang baik antarnegara, dan adanya hubungan antarpemerintah negara.

Operasionalisasi hubungan diplomatik terhadap kasus yang sedang diteliti oleh peneliti adalah hubungan diplomatik formal antara Bolivia dengan Chile yang sempat terputus pada tahun 1978 karena tuntutan Bolivia untuk mendapatkan akses menuju Samudera Pasifik yang berdaulat kepada Chile tidak disetujui oleh Chile. Hubungan diplomatik formal yang sempat terputus tersebut lazimnya menyebabkan berkurangnya intensitas hubungan perekonomian antara Bolivia dengan Chile.

I.8.1.2 Ideologi politik.

Ideologi politik menurut David McLellan adalah sebuah konsep yang paling sukar dipahami di dalam ilmu sosial karena memiliki banyak istilah politis yang terkandung di dalamnya.³⁷ Sedangkan Erikson R. S. dan Tedin K. L. mengartikan ideologi politik sebagai

³⁶ Diplomatic Dictionary, s.v. "formal diplomacy", <http://diplomacy.state.gov/discoverdiplomacy/references/169792.htm> (diakses pada tanggal 16 Juni 2015).

³⁷ David McLellan, 1995 dalam Andrew Heywood, *Political Ideologies: An Introduction (Third Edition)*, (New York: Palgrave Macmillan, 2003), 4.

seperangkat kepercayaan mengenai tatanan yang tepat mengenai masalah sosial dan bagaimana hal tersebut dapat dicapai.³⁸

Operasionalisasi ideologi politik terhadap kasus yang sedang diteliti oleh peneliti adalah ideologi politik Presiden Morales dan Presiden Bachelet yang sama-sama sosialis menjadi asumsi awal hubungan bilateral antara Bolivia dengan Chile membaik. Namun, pada kenyataannya ideologi politik bukan menjadi satu-satunya tolok ukur hubungan bilateral antarnegara yang baik atau buruk.

1.8.1.3 Negara *landlocked*.

Negara *landlocked* adalah negara yang tidak memiliki akses menuju wilayah perairan, memiliki lintas perbatasan yang terbatas, dan memiliki ketergantungan *transit*.³⁹ Negara *landlocked* seringkali dikelilingi oleh negara pesisir atau negara *coastal* yang memiliki karakteristik berbeda, baik dari aspek diplomatik, geografis, dan sosio-ekonomi.⁴⁰ Terdapat 31 negara *landlocked* yang masih merupakan kategori negara berkembang, di mana 15 di antaranya berada di Afrika, 12 di antaranya berada di Asia, dua di antaranya berada di Amerika Latin, dan dua yang lainnya berada di Eropa Tengah dan Timur.⁴¹

³⁸ Erikson R. S. dan Tedin K. L., 2003 dalam John T. Jost, Christopher M. Federico, dan Jaime L. Napier, "Political Ideology: Its Structure, Functions, and Elective Affinities" *Annual Review of Psychology* 60 (2009) 309.

http://www.psych.nyu.edu/jost/Political%20Ideology__Its%20structure,%20functions,%20and%20elective%20a.pdf (diakses pada tanggal 9 Mei 2015).

³⁹ "The Problems of Landlocked Countries", *GFP (The Global Facilitation Partnership) for Transportation and Trade*, <http://gfptt.org/node/44> (diakses pada tanggal 9 April 2015).

⁴⁰ Bidisha Lahiri dan Feroz K. Masjidi, "Landlocked Countries: A Way to Integrate with Coastal Economies" *JEI (Journal of Economic Integration)* 27:4 (2012) 506. http://www.e-jei.org/upload/JEI_27_4_505_519_714.pdf (diakses pada tanggal 9 April 2015).

⁴¹ *The GFP for Transportation and Trade*.

Operasionalisasi negara *landlocked* terhadap kasus yang sedang diteliti oleh peneliti adalah Bolivia sebagai salah satu negara *landlocked* di Amerika Latin. Bolivia menjadi negara *landlocked* akibat konsekuensi kemenangan Chile pada Perang Pasifik sehingga berhak atas seluruh wilayah pantainya.⁴²

1.8.1.4 Identitas nasional.

Menurut William Bloom, identitas nasional adalah di mana sekumpulan orang membuat identifikasi yang sama dan membuat simbol nasional di mana simbol tersebut telah diinternasionalisasikan.⁴³ Sedangkan menurut Peter Berger dan Thomas Luckmann, identitas nasional didefinisikan secara obyektif sebagai sebuah lokasi dari tempat tertentu di belahan Bumi dan dapat secara subyektif disesuaikan hanya pada suatu tempat tertentu saja.⁴⁴ Identitas nasional sehingga menurut N. Johnston menjadi alat untuk menyatukan masyarakat yang hidup di suatu tempat tertentu.⁴⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa identitas nasional identik dengan tempat di mana seseorang tinggal dan disempurnakan

⁴² Juan Antonio Morales dan Jeffrey D. Sachs, "Bolivia's Economic Crisis" dalam *Developing Country Debt and the World Economy*, ed. Jeffrey D. Sachs, 57 (Chicago: University of Chicago Press, 1989).

⁴³ William Bloom, 1990:52 dalam James D. Fearon, "What Is Identity (As We Now Use the Word)?" *Department of Political Science Stanford University* (1999) 4. <https://web.stanford.edu/group/fearon-research/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/What-is-Identity-as-we-now-use-the-word-.pdf> (diakses pada tanggal 9 April 2015).

⁴⁴ Peter Berger dan Thomas Luckmann, 1996:132 dalam James D. Fearon, "What Is Identity (As We Now Use the Word)?" *Department of Political Science Stanford University* (1999) 5. <https://web.stanford.edu/group/fearon-research/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/What-is-Identity-as-we-now-use-the-word-.pdf> (diakses pada tanggal 9 April 2015).

⁴⁵ N. Johnston, 1995 dalam Häkli Jouni, "Cultures of Demarcation: Territory and National Identity in Finland" dalam *Nested Identities: Identity, Territory, and Scale*, ed. Guntram H. Herb dan David H. Kaplan, 3 (Maryland: Rowman and Littlefield, 1999).

dengan simbol-simbol nasional tertentu yang telah dikenal oleh masyarakat internasional.

Operasionalisasi identitas nasional terhadap kasus yang sedang diteliti oleh peneliti adalah bahwa menjadi sebuah negara maritim adalah sebuah identitas nasional Bolivia. Namun, karena kemudian Bolivia menjadi sebuah negara yang *landlocked*, masyarakat Bolivia menjadi terpacu untuk mendapatkan kembali wilayah pantainya yang telah dianeksasi oleh Chile karena telah mencederai identitas nasional mereka.

1.8.2 LoA atau peringkat analisis.

Dalam menganalisis suatu perubahan kebijakan luar negeri, perlu diketahui LoA-nya terlebih dahulu. Penentuan LoA sangat penting karena dalam menganalisis suatu tindakan dalam Ilmu Hubungan Internasional terdapat banyak faktor yang mempengaruhi para pembuat kebijakan dalam menemukan alternatif kebijakan luar negeri mereka, sehingga LoA membantu peneliti untuk memilah faktor mana yang paling sering muncul sehingga dapat melakukan efisiensi penulisan; memilah dampak-dampak dari sekelompok faktor terhadap suatu fenomena dan dampak-dampak dari faktor-faktor lainnya lalu dibandingkan dampak dari dua kelompok faktor tersebut sehingga dari sebuah fenomena didapati penjelasan yang lebih mendalam; dan membuat peneliti menjadi lebih peka terhadap kemungkinan kesalahan metodologis yang mungkin terjadi dalam penggunaan LoA, yaitu *fallacy of composition* yang merupakan kesalahan yang diakibatkan oleh asumsi generalisasi terhadap perilaku sebagian untuk menjelaskan perilaku

keseluruhan dan *ecological fallacy* yang merupakan kesalahan akibat memakai generalisasi yang ditarik pada keseluruhan untuk menjelaskan sebagian.⁴⁶

Dalam analisis kebijakan luar negeri, ditawarkan empat jenis LoA, yaitu (1) LoA individu yang berfokus pada kebijakan yang diambil oleh individu yang paling berperan di dalam sebuah negara, biasanya individu yang sering digunakan adalah pemimpin negara, menteri luar negeri, atau menteri pertahanan; (2) domestik yang berfokus pada pengaruh yang ditimbulkan oleh faktor-faktor domestik suatu negara, seperti organisasi politik, kelompok kepentingan, dan lembaga pemerintahan yang ada di negara tersebut; konflik etnis; tipe sistem politik; kompleks industrial-militer atau MIC; *gender*; sektor ekonomi dan industri; nasionalisme; dan opini publik; (3) *inter-state* yang berfokus pada interaksi antarnegara akibat pengaruh dari sistem internasional terhadap aktor-aktor hubungan internasional, seperti BoP, aliansi, perjanjian, kesepakatan, dan lain-lain; dan (4) global yang berfokus pada tren global dan tekanan-tekanan yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan di dalam interaksi antarnegara, seperti perubahan teknologi, revolusi informasi, imperialisme Barat, dan lain-lain.⁴⁷

Sedangkan untuk menganalisis kasus perubahan kebijakan luar negeri Bolivia terhadap hubungan bilateralnya dengan Chile pada tahun 2001 – 2006, peneliti menggunakan satu LoA saja, yaitu LoA domestik.

⁴⁶ Mohtar Mas' oed, "Tingkat-Tingkat Analisis" dalam *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, ed. Mohtar Mas' oed, 94 – 96 (Jakarta: LP3ES, 1990).

⁴⁷ Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pavese, *International Relations Tenth Edition*, (London: Pearson Education Limited, 2014), 171 – 174.

LoA domestik yang digunakan peneliti adalah sifat nasionalisme, tipe pemerintahan, dan sektor ekonomi dan industri Bolivia. Sifat nasionalisme Bolivia dapat dilihat dari identitas nasional Bolivia sebagai salah satu negara di Amerika Latin yang memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara di Amerika Latin lainnya, salah satu kesamaannya adalah identitas nasional mereka. Negara-negara di Amerika Latin cenderung berusaha untuk membangun citra sebagai kelompok homogen yang berbagi kesamaan sejarah, budaya, dan asal atau *origin*.⁴⁸ Oleh karena itu, tidak heran jika hubungan bilateral Bolivia dengan Chile cukup buruk karena sebagai salah satu negara di Amerika Latin, sejarah buruk dengan Chile sudah terkonstruksi di masyarakat Bolivia karena sebelumnya menjadi sebuah negara maritim merupakan kebanggaan tersendiri bagi Bolivia sehingga menjadi identitas nasionalnya.⁴⁹ Sedangkan dari segi tipe pemerintahan, Bolivia sendiri merupakan sebuah negara demokratis dan sosialis di bawah kepemimpinan Presiden Morales. Partai yang berkuasa pada saat Presiden Morales menjabat sebagai Presiden Bolivia, yaitu MAS Bolivia telah memberikan banyak kontribusi positif terhadap Bolivia, seperti partisipasi politik masyarakat Bolivia yang meningkat, pemerintahan yang lebih demokratis, dan lain-

⁴⁸ Sandra Venessa Bernal Heredia, "The Third Nation: A Project of National Identity Formation in Bolivia" (tesis yang dipresentasikan pada program Master of Science, University of Miami, Agustus, 2009) 11.

⁴⁹ Fernando García Argañarás, "Memory, History, and Identity in Bolivia's Foreign Policy toward Chile under Morales" *Symposium Conflict, Memory, and Reconciliation: Bridging Past, Present, and Future in Kigali, Rwanda* (2012) 13.
http://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1034&context=conflict_reconciliation_symposium (diakses pada tanggal 23 April 2015).

lain.⁵⁰ Sedangkan dari segi sektor ekonomi dan industri, Bolivia termasuk salah satu negara yang termiskin di Amerika Latin, namun kaya akan gas alam. Sayangnya, kondisi geografis Bolivia yang *landlocked* menyebabkan perekonomian di Bolivia terhambat sehingga Bolivia sangat mengandalkan bantuan dari negara lain.⁵¹

I.8.3 Tipe penelitian.

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijabarkan peneliti sebelumnya, tipe penelitian dari penelitian ini adalah tipe penelitian eksplanatif. Tipe penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih dari sebuah gejala atau variabel. Terdapat dua variabel yang terdapat dalam tipe penelitian eksplanatif, yaitu variabel dependen atau bergantung yang sifatnya dipengaruhi atau sebagai akibat dan variabel independen atau tidak bergantung yang sifatnya mempengaruhi atau sebagai sebab.⁵² Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah hubungan bilateral antara Bolivia dengan Chile dan yang menjadi variabel independen adalah kebijakan luar negeri Bolivia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

I.8.4 Teknik pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, teknik penelitian yang dilakukan adalah dengan studi literatur atau kepustakaan. Data-data yang digunakan dapat bersumber dari literatur atau kepustakaan dari penelitian yang telah ada

⁵⁰ Brooke Larson, Raul Madrid, René Antonio Mayorga, dan Jessica Varat, "Bolivia: Social Movements, Populism, and Democracy" *Woodrow Wilson Center Update on the Americas 2* (2008) 2 – 3.

⁵¹ Argañarás, "Memory, History, and Identity in Bolivia's Foreign Policy toward Chile under Morales", 13.

⁵² Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 28.

sebelumnya. Terdapat dua jenis data yang peneliti gunakan, yaitu (1) data primer yang berasal dari buku, jurnal, artikel *online*, dan dokumen resmi serta (2) data sekunder yang berasal dari kutipan-kutipan pengarang dalam buku, jurnal, dan artikel *online*. Pengumpulan data seperti ini diperbolehkan asal dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁵³

I.8.5 Teknik analisis data.

Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif karena sesuai dengan definisi penelitian kualitatif di mana merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.⁵⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung secara matematis sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka.

I.8.6 Jangkauan penelitian.

I.8.6.1 Ruang.

Peneliti mengambil ruang lingkup di wilayah sekitar perbatasan antara Bolivia dengan Chile dan bekas wilayah pantai milik Bolivia yang dianeksasi oleh Chile.

I.8.6.2 Waktu.

⁵³ Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, 266.

⁵⁴ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2009) 77.

Peneliti mengambil rentang waktu antara tahun 2001 di mana hubungan bilateral antara Bolivia dengan Chile mulai membaik – setelah sebelumnya sempat terjadi pemutusan hubungan diplomatik formal antara keduanya pada tahun 1978 – sampai dengan tahun 2006 di mana hubungan bilateral antara keduanya benar-benar mengalami titik balik sehingga melahirkan Agenda 13 Poin 2006.

Namun ada kalanya peneliti melakukan kilas balik pada saat terjadi Perang Pasifik pada tahun 1883 hingga putusnya hubungan diplomatik formal antara Bolivia dengan Chile pada tahun 1978 untuk membantu pembaca memahami latar belakang kasus yang sedang diteliti oleh peneliti.

1.8.7 Sistematika penulisan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulisan penelitian terdiri dari empat bab utama, yaitu:

1.8.7.1 Bab I pendahuluan.

Bab I merupakan bab yang berisi metodologi penulisan penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; tinjauan pustaka; kerangka pemikiran; hipotesis; dan metodologi penelitian yang berisi definisi konseptual dan operasional, LoA, tipe penelitian, tipe pengumpulan data, teknik analisis data, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

1.8.7.2 Bab II kondisi internal Bolivia.

Bab II merupakan bab yang berisi data pendukung penelitian mengenai kondisi internal Bolivia yang meliputi kondisi geografis

Bolivia, tingkat perekonomian Bolivia, serta demografi dan tingkat identitas nasional Bolivia.

1.8.7.3 Bab III hubungan bilateral antara Bolivia dengan Chile.

Bab III merupakan bab yang berisi data pendukung penelitian mengenai hubungan bilateral antara Bolivia dengan Chile yang meliputi Pakta Perdamaian 1884 – Traktat Perdamaian, Persahabatan, dan Perdagangan 1904, dinamika hubungan bilateral antara Bolivia dengan Chile, dan Agenda 13 Poin 2006.

1.8.7.4 Bab IV analisis data.

Bab IV merupakan bab yang berisi analisis data yang dihimpun dari bab II dan III kemudian dikaitkan dengan teori dan metodologi yang dihimpun dari bab I.

1.8.7.5 Bab V kesimpulan dan saran.

Bab V merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi mengenai sintesis pemikiran mulai dari bab I hingga bab IV dan saran berisi mengenai saran peneliti terhadap kasus yang sedang diteliti.